

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TENTANG
PEMBATALAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

AHMAD ZAENURI

NPM : 1521020092

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TENTANG**

PEMBATALAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF C

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

AHMAD ZAENURI

NPM : 1521020092

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Dalam pengujian pasal 10 ayat (1) huruf c Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus 5 (lima) orang dan frasa. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dalam pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 5 (lima) orang kata ketua majelis Mahkamah Konstitusi saat membacakan Amar Putusan Nomor.31/PUU-XVI/2018 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta (23/7/2018). Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara tentang pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018? serta Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi mengenai jumlah anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan pandangan fiqh siyasah mengenai putusan MK No 31/PUU-XVI/2018 tentang pembatalan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian pustaka (*library reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai Pandangan Fiqh Siyasah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Mengenai Pengujian Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf C Undang-Undang No.7 Tahun 2017, yang mengatur anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjumlah tiga atau lima orang, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tak lagi berkekuatan hukum tetap secara bersyarat. *Kedua*, Putusan MK No 31/PUU-XVI/2018 telah sesuai dengan fiqh siyasah yang menunjukkan prinsip keadilan dan keseimbangan dan tujuannya untuk mencapai kemaslahatan bagi terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan konstitusi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
Tentang Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Nama : Ahmad Zaenuri
NPM : 1521020092
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003**

Pembimbing II

**Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003**

Ketua Jurusan Siyasah

**Frenki, M.Si
NIP.198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp.(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 disusun oleh, Ahmad Zaenuri, NPM: 1521020092, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Senin, 24 Februari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)
Sekretaris : Rudi Santoso, MHI.,MH (.....)
Penguji I : Dr. Liky Fa.zal, S.Sos., M.H. (.....)
Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)
Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom. I. (.....)
Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Dr. H. Khairuddin, M.H./
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

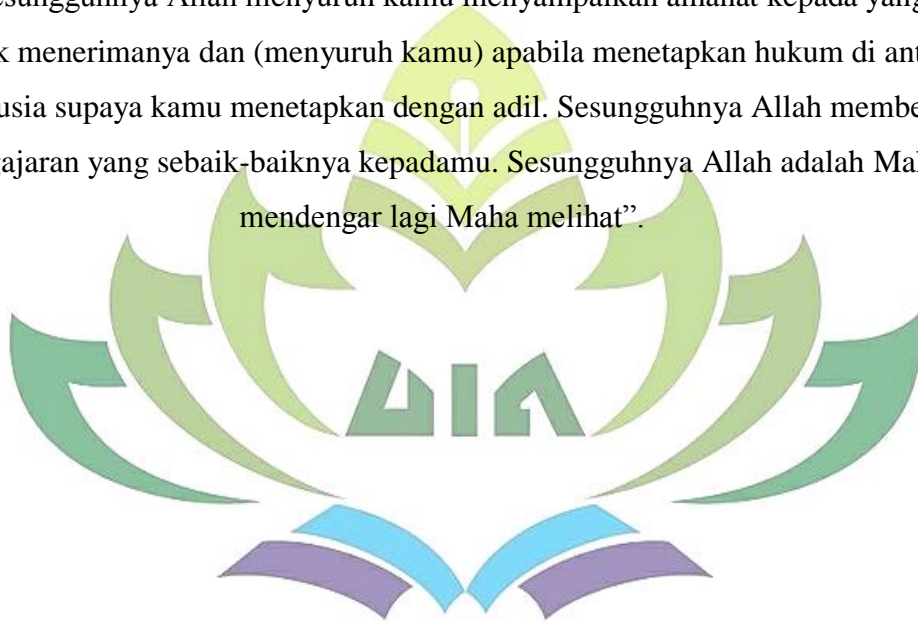
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(Q.S An-Nisa: 58)



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Musijan dan Suhartinem, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak-kakak tercinta, Sri Muntanah, Ahmad Ilutfi, Umi Hani'ah, Imam Safi'i, Muhadi, Siti Mahnudah, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Zaenuri, lahir pada tanggal 1 Januari 1996 di Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang. Anak dari pasangan Bapak Musijan dan Ibu Suhartinem.

1. Taman kanak-kanak Darul Ulum Panca Tunggal Jaya Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2003-2005;
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2005-2010;
3. Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010-2013;
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Penawar Aji Tulang Bawang pada tahun 2013-2015;
5. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Selama perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) diantaranya: Ori, Hikmah, dan Bahasa.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2015, khusus Siyasah E yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 20-Januari-2020

Ahmad Zaenuri
1521020092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	13
1. Konsep Fiqh Siyasah Tentang Pemilihan Umum.....	13

2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	24
B. Tinjauan Pustaka	36

BAB III KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG PENGURANGAN JUMLAH ANGGOTA

KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi.....	42
B. Proses Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Tentang Pengurangan Jumlah Anggota Komisioner KPU Kabupaten/Kota	47
C. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVI/2018	51
1. Pokok-Pokok Permasalahan	51
2. Dasar Pertimbangan.....	55
3. Pendapat Mahkamah	58
4. Putusan Mahkamah	64

BAB IV ANALISIS

A. Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Pengurangan Jumlah Anggota Komisioner KPU Kabupaten/Kota	66
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pengurangan Jumlah Anggota	

Komisioner KPU Kabupaten/Kota	72
-------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Untuk memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Fiqh secara bahasa artinya mengerti secara langsung atau hanya sekedar mengerti saja.²

Siyasah adalah politik yang diambil dari kata *saasa* yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan *saasa al qauma* artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum.³

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁴

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 32.

²Muhammad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab* (Madah: Darul Fikri), h. 1386.

³A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 677.

⁴<https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertianputusan> (8 november 2018).

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Didirikan pada 16 agustus 2003 dan dasar hukumnya adalah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 .⁵

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dari judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ialah meneliti dan mengkaji berdasarkan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara penetapan anggota komisioner komisi pemilihan umum tingkat Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah :

1. Alasan Obyektif

Dalam menyambut akan datangnya pesta demokrasi pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2019 yang akan datang, oleh sebab itu sangat dibutuhkan kesiapan yang matang dari pihak Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara dan penanggung jawab pesta demokrasi tersebut. Sehingga muncul persepektif akan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang tidak memadai dari beban kerja

⁵www.mahkamahkonstitusi.go.id (8 november 2018).

yang akan dihadapi dan dianggap Undang-Undang Pemilu Pasal 10 ayat (1) huruf C tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Alasan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana beban kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta alasan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil Amar putusan tersebut.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu yang sedang dijalani penulis di Fakultas Syari'ah jurusan Siyash Syar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya telah dirubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dihubungkan dengan asas peradilan bebas dimana undang-undang menunjukkan kepada para hakim dalam mengambil putusnya berpegang pada “asas kepatuhan” (*billijkheid*), “rasa keadilan” (*gerechtigheid*), pemberian isi pada asas itikad baik (*te geeter trouw*), dan itikad buruk (*te kwarder trouw*). Dalam melaksanakan asas kebebasan guna menjatuhkan putusan yang tetap hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverfining*) dan kontruksi hukum dengan sebaik-baiknya, seorang hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat.⁶ Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku.

Islam menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Allah atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lillahi ta'alla*. Sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim Mahkamah Konstitusi akan tercipta produk-produk hukum baik melalui ijtihad yang sangat dianjurkan sebagai keahlian hakim yang diharapkan dengan produk tersebut segala bentuk kedhaliman yang terjadi dapat tercegah dan diminimalisir sehingga ketentraman masyarakat terjamin. Dari tugas hakim ini menunjukkan posisi hakim sangat penting sebagai unsur badan peradilan. Hakim sebagai salah satu unsur peradilan yang dipandang penting dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan antara sesama, oleh sebab itu harus didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang professional.

⁶ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta:Aksara Persada Indonesia, 1987), h.34.

Lembaga negara yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selain Mahkamah Konstitusi adalah Komisi Pemilihan Umum yang termasuk lembaga independen dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. KPU merupakan sebuah nama lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota (selanjutnya disingkat KPUD).

Dalam pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf C Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus 5 (lima) orang. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf C bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 5 (lima) orang kata ketua majelis Mahkamah Konstitusi saat membacakan Amar Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 di Gedung Mahkamah Kostitusi Jakarta (23/7/2018).⁷

Seperti diketahui permohonan ini diajukan oleh Erik Fitriandi, Miftah Farit yang merupakan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum

⁷www.mahkamahkonstitusi.go.idamarputusannomor 31/PUU-XVI//2018. (13 Desember 2019)

Kabupaten/Kota dan Wahab Suneth, Iwan Setyono, Akbar Khadafi, Turki, Mu'amar, Habloel Mawadi yang merupakan calon anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Para pemohon berdalih adanya pengurangan jumlah anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) menimbulkan ketidakadilan dan sekaligus ketidakpastian terhadap syarat sahnya keputusan pleno dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang harus disetujui 3 (orang) anggota komisioner dari seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.31/PUU-XVI/2018 merupakan hal yang bijaksana dengan pertimbangan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman geografis Indonesia. Khususnya wilayah Indonesia timur dan tengah yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkauan yang beragam. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi "Suhartoyo" disebutkan berdasarkan pengalaman Pemilu pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Penyelenggaraan Pemilu tetap berjalan baik dan tidak terkendala meski jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah kurang dari 5 (lima) orang. Namun, kata suhartoyo, beban kerja penyelenggaraan Pemilu tingkat daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak tentu akan bertambah. "Penyelenggaraan Pemilu legislatif dan

Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilakukan serentak tentu saja akan memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di Kabupaten/Kota”.⁸

Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, tidak rasional jika meangurangi anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan alasan demi mengurangi beban anggaran dalam Pemilu serentak 2019. Karena mengurangi jumlah anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di beberapa Kabupaten dan Kota menjadi berjumlah 3 (tiga) orang, di tengah bertambahnya beban kerja penyelenggaraan Pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2019 adalah sesuatu yang irasional.⁹

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” yang pembahasan utamanya mengenai pengurangan jumlah anggota komisioner KPU Kabupaten/Kota yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara tentang pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018?

⁸Suhartoyo. “Tanggapan Mengenai Komisioner Pemilu” (Jakarta 2018).

⁹www.mahkamahkonstitusi.go.idamarputusannomor 31/PUU-XVI//2018 (13 Desember 2019).

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tentang pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dari tinjauan fiqh siyasah.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Mengenai Pengujian Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.¹⁰

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lain nya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif

¹⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antar unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹¹

Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan nya kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman serta penafsiran dan interpretasi data mengenai Pandangan Fiqih Siyasah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Mengenai Pengujian Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹³ Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian kepustakaan pada umum nya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian

¹¹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

¹²*Ibid*, h. 68.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 114.

memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan.¹⁴

Yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Negara republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginterventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Metode Pegolahan Data

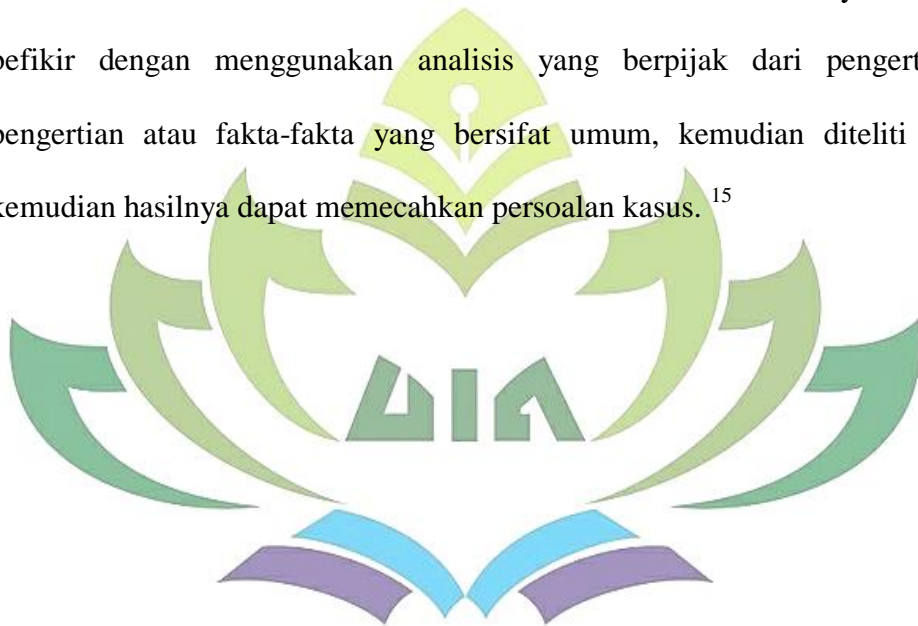
Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara sebagai berikut :

¹⁴Andri Yusuf, <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html> (16 mei 2017).

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka ini serta dokumen maupun sumber lain yang relevan dengan masalah tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan.
- b. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.¹⁵



¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, h.127.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Fiqh Siyasah Tentang Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.¹⁶ Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.¹⁷

Sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, penambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan

¹⁶ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal* (Malang: In-Trans Publishing, 2009), h. 6.

¹⁷ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai pengawal Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), h. 1.

menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya Baiat al-Nuqaba' (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.¹⁸

Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah Saw. dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw. agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.¹⁹

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat

¹⁸Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 304-305.

¹⁹ *Ibid*, h. 304-305.

tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Pada saat pemilihan Abu Bakr yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakr, yaitu ‘Umar ibn al-Khattab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa’ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak Abu Khudzayfah yang telah dimerdekakan.²⁰ Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus.

Hal ini berbeda dengan ‘Umar ibn al-Khattab yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abu Bakar. Meskipun demikian, ‘Umar ibn al-Khattab menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika ‘Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.²¹

Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin). Riwayat selanjutnya adalah perbuatan ‘Abd al-Rahman ibn

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23.

²¹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Mengungkap*, h. 306.

‘Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang laik menjadi seorang khalifah setelah ‘Umar ibn al-Khattab wafat. Diwirayatkan bahwa ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantap pilihan jatuh pada ‘Ustman ibn ‘Affan. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Utsman.

Riwayat ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan ‘Ali ibn Abi Thalib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentangnya. Pada saat ‘Ali ibn Abi Thalib terpilih, ‘Ali ibn Abi Thalib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-hall wa al-‘aqdi*. ‘Ali ibn Abi Thalib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.²²

Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyaksikan baiat seorang pemimpin (khalifah). Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu: *Pertama*, kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh al-Khulafa’ al-Rasyidin yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan. *Kedua*,

²²Abu Ja’far al-Thabari, *Tarikh al-Thabari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 75.

menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.²³

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah: *Pertama*, menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi*, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat 'Ali ibn Abi Thalib. *Kedua*, pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahl al-hall wa al-'aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati

²³ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, h. 308 – 309.

para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini. *Ketiga*, adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* atau ikut serta (bersama *ahl al-hall wa al-'aqdi*) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.²⁴

b. Dasar Hukum

Dalam Islam, pemilu dilakukan dalam rangka memilih pemimpin sebagai khalifah. Secara etimologi, kepemimpinan dalam artian khilafah berasal dari kata *khalafa* yang mempunyai makna pimpin sedangkan khalifah berarti pemimpin.²⁵ Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (Q.S Al-Baqarah: 30)

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di

²⁴ *Ibid*, h. 309-310.

²⁵ Ridwan Yahya, *Kepimpinan dalam Al Quran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Berdasarkan ayat tersebut bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya. Muhammad Quraish Shihab dalam "Tafsir al-Mishbah" mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya. Penyampaian ini bisa jadi merupakan bagian dari proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Maksud Allah ini kemudian didengar oleh malaikat dan malaikat lalu bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa khalifah (manusia) ini akan merusak dan menumpahkan darah.²⁶

Menurut Ibnu Katsir, Imam Al-Qurthubi dan ulama" yang lain telah menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah untuk menyelesaikan dan memutuskan pertentangan antara manusia, menolong orang yang teraniaya, menegakkan hukum Islam, mencegah merajalelanya kejahatan dan masalah-masalah lain yang tidak dapat terselesaikan kecuali dengan adanya imam (pimpinan).²⁷

²⁶ Achmad Chodjim, *Membangun Surga* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 174.

²⁷ M. Hasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 104.


Pemilu dalam Islam yang berarti memilih pemimpin, memiliki nilai-nilai yang dipraktekkan dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai keadilan, nilai musyawarah, dan nilai persamaan. Ketiga nilai tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin dalam Islam.

1) Nilai Keadilan

Secara umum, keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqih dan para mufasir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana telah diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul. Syariat Islam adalah penyempurnaan syariat-syariat yang telah ada sebelumnya.

Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(Q.S An-nisa: 58) 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Rasulullah saw. Bersabda, “Umat ini akan baik selama mereka mengatakan benar, menghukum dengan adil, memberi kasih apabila diminta kasih. Juga, makhluk yang paling dicintai oleh Tuhan adalah

pemimpin yang adil dan yang paling dibenci adalah seorang pemimpin yang berlaku dzalim. Pada hari akhir nanti akan ada yang memanggil mana kezhaliman? Mana orang-orang yang membantu kezhaliman ? meraka semua akan berkumpul sampai ada yang mencatat dosa-dosa mereka lalu meraka semua masuk neraka”.

Kalangan ahli hukum dan pemerhati masalah kenegaraan/politik tidak sesering ulama hukum Islam dalam membicarakan makna keadilan, berikut urgensitas komitmen para penguasa untuk berpegang teguh dan menerapkannya, termasuk juga para aparat negara yang berhubungan dengan kepentingan umum. Perintah melaksanakan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan.²⁸

2) Nilai Musyawarah

Al-Qur'an banyak menjelaskan sisi penting musyawarah atau konsultasi.

Allah berfirman dalam surah Asy-syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (Q.S Asy-syura: 38)

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Konklusi bai'ah mengandung suatu proses seleksi. Disitulah syura, sebagaimana diketahui, memainkan peranana penting untuk

²⁸ Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 265.

menentukan pilihan ummah tentang orang yang dipandang paling tepat menduduki jabatan sebagai pemimpin. Jika pemilihan itu ditentukan melalui bai'ah, maka fokus musyawarah bergeser kepada kawasan lain, yakni kepentingan masyarakat. Jadi, apabila bai'ah berarti akhir sebuah transaksi atau keputusan dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan, maka musyawarah merupakan penjajakan penelitian dan perkiraan dengan tujuan meraih cita-cita atau keputusan paling baik yang berkaitan dengan semua persoalan, termasuk masalah kepemimpinan.²⁹

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang ia kemukakan tentang bai'ah. Ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menimba (meminta) pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja, ada batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Dalam prinsip syariat Islam tidak meemberikan konsepsi yang tetap atau ketetapan yang mengikat.

Inilah salah satu rahasia kekenyalan syariat Islam yang tetap *up to date* kini dan esok maka sehubungan dengan situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda-beda, Islam menawarkan metode paling baik, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan otak

²⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 82.

manusia untuk mengelolanya, mengatur dan memikirkannya sesuai dengansituasi dan kondisi yang berkaitan dengan topik masalah yang akan dimusyawarahkan.

3) Nilai Persamaan

Persamaan dalam Islam adalah prinsip dasar dan agung nilainya bagi kehidupan manusia. Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(Q.S Al-Hujurat: 13)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal dan tolong menolong. Bukan malah sebaliknya, untuk saling menyombongkan diri menurut ras dan diskriminasi bangsa. Tidak pula untuk berbangga diri atas dasar perbedaan warna, pangkat dan juga golongan. Untuk itulah Islam menganjurkan untuk mengikis habis akar-akar fanatisme dan golongan, serta membuang jauh-jauh kebanggan atas keturunan dan warna kulit. Kemudian Islam menyatakan standar kemuliaan seseorang adalah kebaikan perilaku dan budi perkerti serta ketakwaannya kepada Allah Yang Mahakuasa.

2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia

a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).³⁰

Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu Komisi Pemilihan Umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas,

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 236-239.

lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK. Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK.³¹

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara. Posisi Komisi Pemilihan Umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu *main state organ* (lembaga negara utama), dan *auxiliary state organ* (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*.³²

Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum merupakan *auxiliary state body*, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (*main state organ*). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori *auxiliary state organ* yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank

³¹Lukman Hakim, *Trik Rahasia Master PHP Terbongkar Lagi* (Yogyakarta : Lokomedia, 2010), h. 55.

³²Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2008), h. 213.

Sentral. Komisi Pemilihan Umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum.³³

Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara Republik Indonesia.

Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

b. Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum

³³Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004* (Bandung: CV Alia Grafika, 2007), h. 78.

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh UUD 1945.³⁴ Kedudukan KPU hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang. Tetapi UUD 1945 menjamin keberadaan KPU karena kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22E yaitu bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri.³⁵

KPU merupakan nama sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum. Dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, nama lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak diharuskan diberi nama KPU karena dalam rumusan Pasal 22E UUD NRI 1945 bacaan KPU ditulis dengan huruf kecil. Maka dari itu, Undang-Undang bisa memberikan nama lain selain nama KPU kepada lembaga penyelenggara pemilihan umum. Namun karena alasan sebelum perubahan UUD 1945 lembaga penyelenggara pemilihan umum sudah

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 233.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (2) dan (5)

dikenal dengan nama KPU, maka dengan dasar latar belakang tentang nama lembaga penyelenggara tersebut Undang-Undang pemilihan umum tetap mengatur dan mempertahankan dengan nama atau sebutan KPU.

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD NRI 1945 yang bersifat nasional, tetap dan mandiri jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang luas dengan daerah kepulauan tanpa dibantu oleh komisi pemilihan Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota.

c. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni dalam Pasal 12 mengatur tentang tugas Komisi Pemilihan Umum:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.

- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Sedangkan mengenai wewenang Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 13 yaitu:

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- 2) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 3) Menetapkan peserta Pemilu.

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 12.

- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga mengatur mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yang termuat dalam Pasal 18 dan 19. Tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih.
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD

³⁷ *Ibid*, Pasal 13.

kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.

- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Wewenang KPU Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi

³⁸ *Ibid*, Pasal 18.

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

d. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 hanya menyebutkan bahwa KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, di Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota serta dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa susunan KPU bersifat hirarki yakni KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempunyai sifat nasional, tetap dan mandiri. Kedudukan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dicarikan konfigurasi dalam konteks kelembagaan di daerah karena KPU yang bersifat nasional, sedangkan KPU Kabupaten/Kota merupakan kepanjangan tangan dari KPU dalam

³⁹ *Ibid*, Pasal 19.

menjalankan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan umum. Sehingga secara jelas dapat dikatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan yang bernama KPU. Kedudukan KPU tidak dapat dicarikan padanannya dalam konteks dan struktur kelembagaan di daerah seperti Pemerintah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.⁴⁰

Tugas tambahan yang diberikan Undang-Undang kepada KPUD dapat dikatakan kurang tepat, karena KPUD merupakan bagian dari KPU yang bersifat hirarkis. KPUD juga merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang dari KPU, artinya yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan umum adalah KPU yang selanjutnya dalam pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang keberadaannya di wilayah Indonesia dan dibantu oleh KPUD di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁴¹

Kedudukan KPUD dapat dikaji dengan teori lembaga negara bahwa KPUD sebagai penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membantu KPU sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan serta tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum secara nasional. Maka keberadaan KPUD bukan lembaga daerah seperti pemerintah daerah, DPRD dan lembaga lain yang sifat

⁴⁰ Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3 (September 2017). h. 565.

⁴¹ *Ibid.*

kedudukannya ada di daerah. Sekalipun dalam menyelenggarakan kegiatannya dibiayai oleh APBN dan APBD.⁴²

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 dan 9 yang menyatakan bahwa wilayah kerja KPU adalah seluruh Indonesia dan susunannya terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarki. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 mengatur bahwa penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Diatur pula dalam pasal 10 bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD.⁴³

Dari beberapa pasal tersebut dapat dikaji bahwa, *pertama*, KPUD merupakan bagian dari KPU yang tidak terpisahkan. *Kedua*, penyelenggaraan Pilkada bukan hanya ditangguhkan kepada KPUD tetapi juga ditangguhkan kepada KPU, artinya KPUD tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada oleh KPU sekalipun KPUD berhak untuk menentukan proses awal berjalannya Pilkada sampai proses akhir penetapan hasil Pilkada. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa hubungan KPUD dengan KPU tidak terpisah dalam hal penyelenggaraan Pilkada.

⁴² *Ibid*, h. 566.

⁴³ *Ibid*.

Dalam PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum tidak spesifik mengatur hubungan hukum antara KPU dengan KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada, namun lembaga tersebut bersifat hierarki karena dalam hal mengambil keputusan terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pilkada yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota maka disampaikan kepada KPU hanya saja prosedurnya berjenjang.⁴⁴ Jika yang mengalami masalah KPU Kabupaten/Kota maka disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk mendapat proses. Begitu pula apabila KPU Provinsi mengalami masalah maka langsung menyampaikan kepada KPU untuk mendapatkan proses penyelesaiannya.

B. Tinjauan Pustaka

Penelusuran penulis mengenai judul ini, memang sudah banyak yang telah melakukan penelitian mengenai Komisi Pemilihan Umum. Namun yang membedakan judul ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada tempat dan kajian yang diteliti dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Penulis belum mendapatkan penelitian tentang adanya pengurangan jumlah anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tim Indonesiabaik.id menyusun bukunya yang berjudul “Buku Pintar 2019 Seri Kedua:Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia” untuk

⁴⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019.

memberikan gambaran serta arahan mengenai Pemilu dalam rangka menyambut Pemilu 2019. Dalam buku tersebut mencakup materi tentang lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum, sistem perhitungan suara sah, bahkan terdapat gambaran secara keseluruhan mengenai sejarah Pemilu. Secara garis besar, poin-poin penting yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu dibahas dalam buku tersebut.

2. Ida Budhianto dalam bukunya yang berjudul “Pemilu di Indonesia” bercerita tentang evolusi penyelenggara Pemilu di Indonesia selama tiga era yakni orde lama, orde baru dan reformasi. Ida menggambarkan spirit penyelenggara Pemilu untuk menegakkan Pemilu di tanah air. Secara teoritis Pemilu berkualitas akan tercipta dengan adanya penyelenggara yang independen. Setiap era di Indonesia memiliki corak dan warna tersendiri dalam desain penyelenggara Pemilu.
3. Fadli Ramadhanil dalam bukunya berjudul “Evaluasi Pemilu Serentak Dari Sistem ke Manajemen Pemilu” memaparkan permasalahan dalam pemilu serentak pada tataran sistemik dan manjerial. Dalam bukunya Fadli menyertakan dua daerah penelitian yaitu provinsi Lampung dan provinsi Jawa Barat. Provinsi Lampung dipilih karena pada Pemilu 2014 menyelenggarakan Pemilu 5 kotak (Pilkada Gubernur, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Provinsi Jawa Barat dipilih karena merupakan daerah paling banyak penduduknya.

Hasil penelitian yang memiliki tema mengenai Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Ichsan tentang “Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 Di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar di kategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: *Pertama*, komunikasi, hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. *Kedua*, Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. *Ketiga*, Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan pemilukada. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kinerja KPU yaitu: *Pertama*, Sumber Daya Keuangan, pemilukada di kabupaten takalar tertunda karena dana penyelenggaraan pemilu belum diberikan. *Kedua*, aktivitas masyarakat, banyaknya masyarakat takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti pemilukada dan menjadi golput.⁴⁵

2. “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng tahun 2013”. Oleh Fakhri S.R. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-

⁴⁵ Muhammad Fajri Ichsan, “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2013), h. 5.

voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan-pelaksanaan e-voting yaitu: *Pertama*, terjadinya hubungan dinamis antara KPU dan Stekholder. *Kedua*, peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan-pelaksanaan e-voting yaitu: *Pertama*, kelemahan saat operasional, fondasi teknis atau hukum pada akhirnya akan muncul ke permukaan dan mungkin akan mendiskreditkan. *Kedua*, konteks negatif sosial politik menciptakan resiko serius, bahkan jika fondasi teknis dan operasional dari solusi e-voting diperdengarkan.⁴⁶

3. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik”, Oleh M. Yusuf A.R. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: *Pertama*, peran KPU dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu. *Kedua*, sosialisasi tentang Pemilu merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. *Ketiga*, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media massa ataupun dengan cara mengadakan simulasi

⁴⁶ Fakhri SR, “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2013), h. 9.

pemungutan suara. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan sesuai dengan kode etik KPU.⁴⁷

Adapun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019” oleh Triono. Dalam jurnalnya memaparkan bagaimana konsep dan model pemilu serentak 2019 yang paling efektif untuk dilaksanakan serta bagaimana kesiapan dari penyelenggaraan pemilu menjadi persoalan utama yang harus dicari solusinya. Undang-Undang Pemilu 2019 yang telah disahkan bersama antara DPR dan Pemerintah menjadi pertarungan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan mutu dan kualitas sistem pemilu di Indonesia. Efektivitas pemilu serentak 2019 dapat dilaksanakan dengan baik setidaknya dengan memperkuat 5 aspek utama yaitu: UU Pemilu yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model pemilu serentak 2019, penyelenggara pemilu yang kapabel dan profesional, efektivitas pembiayaan pemilu serentak yang lebih pro rakyat, kesiapan partai politik dalam pemilu serentak, dan perlunya sosialisasi politik dan partisipasi masyarakat.
2. “Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan KPU” oleh Ratna Herawati. Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa kepastian hukum serta integritas proses dan hasil Pemilu merupakan tanda dari proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang

⁴⁷ M Yusuf A.R, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik”. *Jurnal Universitas 45 Mataram*, (2010), h. 1.

Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, dalam Undang-Undang Pemilu tersebut memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk Peraturan KPU (PKPU) sehingga jalannya proses penyelenggaraan Pemilu lebih praktis.

3. “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019” oleh Aryojati Ardipandanto. Dalam jurnalnya Aryojati menyimpulkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak, oleh karena itu DPR RI melalui fungsi legislasi dapat menginisiasi adanya revisi mengenai Undang-Undang Pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Thabari, Abu Ja'far, *Tarikh al-Thabari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Ar-Rifa'i, M. Hasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimmly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Chodjim, Achmad, *Membangun Surga*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Sigma ExsaMedia Arkanleema, 2009.

Hakim, Lukman, *Trik Rahasia Master PHP Terbongkar Lagi*, Yogyakarta : Lokomedia, 2010.

Ibn Manzhur, Muhammad, *Lisanul Arab*, Madah: Darul Fikri.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintah Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Maju Mundur, 1990.

Latief, Abdul, *Buku Ajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

M. Gaffar, Jenedjri, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta, 2009.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2008.

Rais, Dhiaudin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rizkiyansyah, Ferry Kurnia, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004*, Bandung: CV Alia Grafika, 2007.

Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai pengawal Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.

Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publishing, 2009.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Yahya, Ridwan, *Kepimpinan dalam Al Quran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (2) dan (5).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 12.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019.

Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018.

Jurnal

Ansori, Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3, September 2017.

M Yusuf A.R, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik, *Jurnal Universitas 45 Mataram*, 2010.

Simamora, Janpatar, Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 3, Oktober 2013.

Suhartoyo, Tanggapan Mengenai Komisioner Pemilu, Jakarta 2018.

Wibowo, Mardian, Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, Juni 2015.

Karya Ilmiah

Fakhri SR, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013". Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2013.

Ichsan, Muhammad Fajri, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar", Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2013.

Sumber *on-lone*

Andri Yusuf, <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepastakaan.html> (16 mei 2017).

www.mahkamahkonstitusi.go.id/amarputusannomor31/PUU-XVI//2018
(13 Desember 2019).

<https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertianputusan>
(8 november 2018).

www.mahkamahkonstitusi.go.id (8 november 2018).

[www.mahkamahkonstitusi.go.id/amarputusannomor 31/PUU-XVI//2018](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/amarputusannomor31/PUU-XVI//2018) (13
Desember 2019).

